

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Ali. 2018. Teori & Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen. Prenadamedia Group: Jakarta
- Abdullah, Rozali. 2004. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Burhan, Ashofa. 2000. Metode Penelitian Hukum. Rineka Cipta: Jakarta
- Basrowi dan Sukidin. 2002. Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro. Insan Cendekia: Surabaya
- Dja'is Mochammad dan RMJ. Koosmargono. 2011. Membaca dan Mengerti HIR. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Koentjoro, Diana Halim. 2004. Hukum Administrasi Indonesia. Ghalia Indonesia: Bogor Selatan
- Panjaitan, Budi Sastra. 2016. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. CV. Manhaji Medan: Medan
- Prasetyo, Bambang dan Lina Mifahul Jannah. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Prodjodikoro, Wirjono. 2000. Perbuatan Melawan Hukum. Mandar Maju: Bandung
- Simanjuntak, Enrico. 2018. Hukum Acara Peradilan. Sinar Grafika: Jakarta
- Sukardi. 2003. Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya. Bumi Aksara: Jakarta
- Suteki dan Galang Taufani. 2020. Metode Penelitian Hukum. Raja Grafindo Persada: Depok
- Windasari, Ratna Artha. 2017. Pengantar Hukum Indonesia. Raja Grafindo Persada: Depok

Jurnal

- Abdullah, U. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam Sistem Peradilan di Indonesia.

- Edyanti, Y. (2022). PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PENGUASA (ONRECHTMATIGE OVERHEIDSAAD)(Suatu Tinjauan Analisis Administrasi Pemerintahan). " *Dharmasisya* " *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(2), 14.
- Faisal, S. (2020). Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah Terhadap Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara (Studi putusan Nomor: 968. K/Pdt/1990). *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 1(2), 100-110.
- Gusman, D., Rosari, A., & Pratama, A. P. R. Perlindungan Warga Negara Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah Melalui Penyelesaian Sengketa Di Peradilan Tata Usaha Negara. *Riau Law Journal*, 5(2), 161-178.
- Irvansyah, A. R. (2022). Kedudukan Hukum Keputusan Fiktif Positif Sejak Pengundangan Undang-Undang Cipta Kerja. *JAPHTN-HAN*, 1(2), 208-226.
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum. *Crepido*, 1(1), 13-22.
- Norra, A. A. (2020). Pertentangan Norma Fiktif Negatif Dan Fiktif Positif Serta Kontekstualisasinya Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Hukum Peratun*, 3(2), 141-153.
- Prayogo, R. T. (2016). Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 191-201.
- Ridwan, H. R., Heryansyah, D., & Pratiwi, D. K. (2018). Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(2), 339-358.

Simanjuntak, E. (2017). Perkara Fiktif Positif Dan Permasalahan Hukumnya. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(3), 379-398.

Tungkup, D. L., Perdana, F. W., Irwan, I., Surnata, S., & Siswanto, W. (2022). Implikasi Penerapan Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Pelaksanaan Administrasi Pemerintah. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(08), 1168-1178.

Wulandari, D. (2020). Pengujian Keputusan Fiktif Positif Di Pengadilan Tata Usaha Negara. *Lex Renaissance*, 5(1), 32-56.

Yuniza, M. E., & Inggawati, M. P. (2021). Peluang dan Tantangan Penerapan Keputusan Fiktif Positif Setelah Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal de jure*, 13(2).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XX/2022